

Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang

Darnawati^{✉1} Tri Wijaya Putra² Muhammad Taufiq³

¹ *Accounting, Universitas Ichsan Gorontalo*

^{2,3} *Accounting, Universitas Ichsan Sidenreng Rappang*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efektivitas dan efisiensi Pemerintah Daerah Sidenreng Rappang dalam merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan data laporan realisasi APBD tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, dianalisis menggunakan rasio keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemandirian finansial Sidenreng Rappang belum sepenuhnya mandiri dan masih mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat. Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan fluktuasi yang signifikan, dan rasio efisiensi mencerminkan komitmen peningkatan efisiensi belanja. Rasio belanja operasional atau belanja tidak langsung yang jauh lebih tinggi dibandingkan belanja modal menunjukkan bahwa pemerintah lebih fokus pada belanja operasional sehari-hari dibandingkan mengalokasikan untuk pembangunan daerah. Lebih lanjut, pertumbuhan pendapatan daerah di Sidenreng Rappang mengalami variasi antara tahun 2020 dan 2022, dimana pertumbuhan pada tahun 2021 diikuti penurunan pada tahun 2022. Meski demikian, PAD menunjukkan perubahan yang positif.

Kata kunci : Efektivitas PAD, Efisiensi Belanja Daerah.

Abstract

This study aims to measure the level of effective, efficient and economical categories in the financial function at PT Azahra Raya Tama, in addition to providing suggestions or recommendations in the implementation of management audits in the financial function at PT Azahra Raya Tama. The theoretical basis used in this study is management audit. The analysis tool used in this study is a checklist technique using a qualitative descriptive method on the management audit working paper on the financial function audit program. The data collection technique in this study is by conducting interviews and questionnaires to relevant departments in the financial sector at PT Azahra Raya Tama. The results of the research that has been carried out on management audits in the financial function using financial function audit programs with the Dean J. Champions formula show the results for each category as follows: 1) 77% for the effective category based on the results of the calculation of the overall analysis can be concluded that the management audit in the financial function includes the very effective category. 2) 90% for the efficient category based on the results of the overall calculation of the analysis can be concluded by management audits in the financial function including the very efficient category. 3) 86% for the economic category based on the results of the overall calculation of the analysis can be concluded by management audits in the financial function including the very economic category.

Keywords : PAD effectiveness, regional spending efficiency.

Copyright (c) 2024 Qurotul Aini

✉ Corresponding author :

Email Address : darnawatywanda@gmail.com ^{✉1} tri.wijayaputra1701@gmail.com ²
muhammadtaufiq@gmail.com ³

PENDAHULUAN

Salah satu bagian terpenting dalam melaksanakan suatu rencana atau program adalah anggaran. Penting untuk merencanakan program dengan cermat sebelum melaksanakannya sehingga dapat mencapai tujuannya. Ini ada hubungannya dengan uang. Merupakan tugas pemerintah dan sektor publik untuk tetap berpegang pada anggaran mereka sehingga mereka dapat mencapai tujuan pengeluaran mereka. Anggaran di sektor publik itu rumit, berbeda dengan anggaran di sektor swasta yang tujuan utamanya adalah menghasilkan uang. Menurut Rudy Badrudin (2017:98), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh uang yang diperoleh dan dikeluarkan oleh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka mencapai pembangunannya. tujuan dalam satu tahun. DPRD menyetujui rencana tersebut dalam bentuk peraturan hukum yang dikenal dengan peraturan daerah.

Bagian perencanaan harus memastikan bahwa keseluruhan proses pembuatan APBD dapat menunjukkan semaksimal mungkin tentang bagaimana keputusan diambil mengenai arah kebijakan umum, skala prioritas, serta alokasi dan distribusi sumber daya. Hal ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan partisipasi masyarakat agar belanja di daerah hemat, efektif, dan efisien. dengan output yang jelas dan pendapatan yang sejalan dengan tujuan pertumbuhan, sehingga seluruh anggaran dapat dijelaskan kepada masyarakat secara jelas. Dalam penganggaran item baris, jumlah yang dibelanjakan tidak mudah diukur karena hanya mencakup penambahan atau pengurangan anggaran berdasarkan anggaran tahun sebelumnya. Anggaran biaya ini kurang obyektif dan lebih besar kemungkinannya untuk dimanipulasi karena tidak adanya standar biaya yang jelas. Dalam kaitannya dengan pemerintah daerah, jangkauan anggaran sangatlah penting. Sebab, anggaran berpengaruh terhadap seberapa baik pemerintah menjalankan tugasnya dalam memberikan manfaat publik kepada rakyat. APBD menunjukkan berapa banyak uang yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk sektor publik. Hal ini merupakan akibat dari bagaimana sumber daya tersebut dialokasikan pada pemerintah daerah. (1949, hal. 81) Fadillah Amin

Karena pemerintah daerah menjadi kurang tersentralisasi dan masyarakat ingin pemerintah daerah bersikap terbuka dan bertanggung jawab, pemerintah perlu membentuk sistem pengelolaan keuangan yang dapat meningkatkan perekonomian, kinerja, dan efisiensi. Sistem ini harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, tertib, dan sah, dan program harus dibuat berdasarkan anggaran kinerja prioritas. Banyak kaitannya dengan maksud, tujuan, dan rencana jangka panjang untuk mencapainya. Sehingga tujuan dan gagasan suatu kelompok tercermin dalam pekerjaan yang dilakukan. Anggaran berbasis kinerja terdiri dari tiga bagian: penanda kinerja, standar biaya, dan pengukuran kinerja. Ketiga hal tersebut digunakan untuk mengukur input, output, dan hasil suatu program yang disusun berdasarkan kinerja agar dapat berjalan lebih baik dan efisien. Jika keberhasilan kinerja dan efisiensi tercapai, maka tanggung jawab kinerja akan terwujud, dan hal ini merupakan hal yang diinginkan oleh semua kelompok sektor publik.

Penelitian Resky Dwianty (2021:534) menemukan bahwa kegunaan dan efisiensi penggunaan anggaran dipengaruhi oleh seberapa baik pemerintah daerah menangani uangnya. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik keberhasilan finansial

suatu daerah, maka semakin baik pula penggunaan dana dan belanjanya. Pada saat yang sama, para ahli lain menemukan bahwa keberhasilan pendapatan belumlah baik, seperti yang ditunjukkan oleh fakta bahwa uang yang dihasilkan lebih sedikit dari yang direncanakan. Pada saat yang sama, belanja pemerintah daerah berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari realisasi belanja yang kurang dari rencana. Jadi, pemerintah daerah perlu memangkas biaya dan menaikkan PAD sekaligus memangkas belanja (Fadillah Amin, 2019:65).

Laporan anggaran pendapatan dan belanja daerah perlu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sebab, laporan keuangan daerah merupakan bagian dari sistem keuangan negara. dimana anggaran sebenarnya tidak selalu naik atau turun dalam jumlah besar dari tahun ke tahun. Menurut penelitian Tenda M.V.S., dkk. (2014:638), anggaran daerah untuk pendapatan dan belanja tidak mengalami perubahan yang signifikan. Hal ini terutama berlaku untuk belanja bantuan sosial, hibah, infrastruktur, jalan, dan imigran. Terjadi surplus apabila anggaran yang diterima lebih besar dari anggaran yang sebenarnya dikeluarkan. Di sisi lain, kepala daerah memastikan tujuan belanja daerah lebih sering terpenuhi sehingga daerah yang dipimpinnya memiliki kinerja keuangan yang lebih baik.

Sangat penting untuk memeriksa seberapa transparan dan bertanggung jawab pemerintah daerah dalam menggunakan anggaran daerah dengan melihat seberapa baik dan efisien laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan alat kebijakan yang sangat penting digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat daerah. Hal ini digunakan agar pemerintah daerah dapat menunjukkan bahwa mereka mampu membelanjakan dan mencapai APBD secara efektif dan cepat. Jadi, agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat digunakan secara efektif dan efisien, pemerintah daerah harus bekerja terbuka dan bertanggung jawab agar kinerjanya lebih baik.

Berikut adalah angka anggaran daerah baik pendapatan maupun belanja untuk kantor kabupaten. Juga Rappang Sidenreng.

Tabel 1 Laporan Anggaran Pendapatan Dan Realisasinya Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentasi (%)	Analisis Efektif
2017	1.366.000.000.000,88	1.307.000.000.000,89	96%	Eektif
2018	1.467.000.000.000,34	1.192.000.000.000,42	81%	Efektif
2019	1.274.000.000.000,33	1.235.000.000.000,86	97%	Efektif

Sumber; data diolah penulis (2023)

Berdasarkan studi mengenai keberhasilan pembagian pendapatan anggaran pemerintah kabupaten. Sejak tahun 2017 hingga 2019, 96%, 81%, dan 97% masyarakat menilai Sidenreng Rappang telah melakukan pengelolaan anggaran pendapatan dengan baik. Jumlah yang paling efisien dicapai pada TA 2019, yaitu mencapai angka 97%.

Tabel 2 Laporan Anggaran Belanja Dan Realisasinya

Tahun	Anggaran	Realisasi	Rata-Rata	(%)	Analisis Efisien
2017	1.390.000.000.000,09	1.298.000.000.000,75	93%	7%	Sangat efisien
2018	1.491.000.000.000,63	1.185.000.000.000,91	76%	24%	Sangat efisien

2019	1.279.000.000.000,67	1.223.000.000.000,44	96%	4%	Sangat efisien
------	----------------------	----------------------	-----	----	----------------

Sumber; data diolah penulis (2023)

Peneliti melihat seberapa efisien pemerintah daerah Kab. Sidenreng Rappang mengeluarkan uang dan ternyata sangat efisien. Hal ini dikarenakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang mampu menangani anggaran dengan baik pada tahun anggaran 2017-2019. Hal ini terlihat dari anggaran belanja Kabupaten Sidenreng Rappang yang telah dipatuhi dan tidak ada jumlah yang melebihi anggaran. Anggaran TA 2017 digunakan dengan baik sebanyak 7% pada tahun 2017, 15% pada tahun 2018, dan 4% pada tahun 2019.

Penelitian ini dilakukan pada pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang karena merupakan salah satu pemerintah daerah yang menerapkan otonomi daerah. Artinya pemerintah pusat telah memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada setiap pemerintah daerah untuk mengelola keuangannya sendiri, dan tujuannya adalah untuk mengetahui apakah pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang telah melaksanakan anggaran pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien. Selain itu, belum banyak penelitian yang dilakukan mengenai APBD di daerah Sidenreng Rappang pada masa lalu. Hal inilah yang membuat masyarakat ingin mempelajari pemerintahan Kabupaten Sidenreng Rappang.

METODOLOGI

Tujuan penelitian ini adalah untuk meninjau laporan mengenai bagaimana Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang memenuhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama tahun anggaran 2020-2022. Penelitian dilakukan di Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang berlokasi di Jl. Gunung Bawakaraeng No. 1, Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan. Fokus kajian ini mencakup pendapatan dan belanja daerah dengan menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif untuk menganalisis data laporan realisasi anggaran dalam periode tersebut. Penelitian ini memanfaatkan sumber data sekunder berupa dokumen laporan keuangan yang dianalisis untuk mendapatkan gambaran mengenai rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, serta pertumbuhan pendapatan dan belanja daerah.

Metode analisis kuantitatif deskriptif digunakan untuk mengolah data berdasarkan ukuran-ukuran keuangan tertentu, seperti rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, dan keserasian belanja. Rasio kemandirian digunakan untuk mengukur ketergantungan daerah terhadap dana dari luar, dengan menghitung proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan atau bantuan dari pemerintah pusat. Efektivitas pendapatan dihitung dengan membandingkan realisasi PAD dengan target yang ditetapkan, sementara efisiensi belanja dihitung berdasarkan rasio antara realisasi belanja dan anggaran yang direncanakan. Selain itu, rasio belanja operasional digunakan untuk menilai porsi anggaran yang digunakan untuk keperluan operasional, serta rasio pertumbuhan untuk mengidentifikasi tren pertumbuhan pendapatan atau belanja dalam periode tertentu.

Teknik pengumpulan data meliputi penelitian lapangan dan dokumentasi. Penelitian lapangan dilakukan dengan observasi langsung ke Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mendapatkan data relevan. Sementara itu, teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tambahan dari dokumen realisasi anggaran pemerintah daerah tahun 2020-2022. Hasil analisis data ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pengelolaan keuangan daerah, termasuk efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, serta

tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Sidenreng Rappang selama periode penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil dari analisis laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang maka dapat dijabarkan pembahasan sebagai berikut :

1. Analisis Varians (Selisih) Anggaran Pendapatan

Pengelolaan bidang pendapatan daerah selama periode 2020-2022, berdasarkan capaian Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dari sektor-sektor pendukung. Tabel berikut menunjukkan perkembangan target anggaran dan capaian realisasinya selama periode tersebut.

Tabel 3 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang 2020-2022

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2020	1.225.093.920.000,00	1.186.736.488.855,58	96,87
2021	1.258.769.098.500,00	1.200.338.615.401,39	95,36
2022	1.257.309.100.000,00	1.172.625.829.994,00	93,26

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Senreng Rappang

Berdasarkan analisis varians, kinerja pendapatan Kabupaten Sidenreng Rappang selama periode 2020-2022 menunjukkan pencapaian yang hampir mendekati target anggaran meskipun tidak ada yang melampaui. Persentase realisasi pendapatan mencapai rata-rata 96,87%, dengan capaian tertinggi pada tahun 2020 sebesar 96,87%, sementara tahun 2021 mencapai 95,36%, dan 93,26% pada tahun 2022. Realisasi ini mencerminkan pengelolaan yang cukup baik meskipun terdapat penurunan dari target anggaran. Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami tren menurun dengan persentase 92,29% pada tahun 2020, 85,70% pada 2021, dan 80,95% pada 2022, menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Daerah selama periode tersebut menunjukkan kinerja yang stabil meskipun juga mengalami penurunan dari 98,38% pada tahun 2020 menjadi 96,76% di tahun 2021, dan 95,89% pada 2022. Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami penurunan signifikan dari 91,97% pada tahun 2020 menjadi 87,43% pada 2021, dan 64,40% pada 2022, mencerminkan adanya tantangan dalam pengumpulan pendapatan dari sumber ini. Secara keseluruhan, kinerja pendapatan daerah tergolong cukup solid, namun diperlukan evaluasi dan langkah strategis untuk mengatasi penurunan pada beberapa komponen, khususnya PAD dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, guna memastikan pengelolaan pendapatan yang lebih optimal di masa mendatang.

2. Rasio Kemandirian

Ketika rasio kemandirian meningkat, partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah, yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD), juga meningkat. Dengan demikian, menggunakan analisis rasio kemandirian berikut ini, tingkat kemandirian Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dapat diketahui berdasarkan tabel yang tersedia setelah dilakukan analisis menggunakan rasio keuangan berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat}} \times 100\%$$

Tabel 4 Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian Pemerintah Kabupaten Sidenereng Rappang Tahun Anggaran 2020-2022

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Dana Perimbangan (Rp)	%	Kemandirian
2020	132.951.314.765,71	913.532.902.309,87	15	Instruktif
2021	136.809.515.757,39	1.063.529.099.644,00	13	Instruktif
2022	161.869.158.604,00	1.004.399.130.861,00	16	Instruktif

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Senreng Rappang

Rasio kemandirian mencerminkan tingkat ketergantungan daerah terhadap dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin rendah ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi, dan sebaliknya. Rasio ini juga mencerminkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah; semakin tinggi rasio kemandirian, semakin besar kontribusi PAD sebagai komponen utama. Pada tahun anggaran 2020, rasio kemandirian keuangan daerah adalah 0,15 atau 15%, pada tahun 2021 turun menjadi 0,13 atau 13%, dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 0,16 atau 16%. Pada tahun 2020, kemandirian daerah Kabupaten Sidenereng Rappang, dengan PAD sebesar Rp132.951.314.765,71, menunjukkan tingkat kemandirian yang lebih tinggi dibandingkan bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi yang mencapai Rp913.532.902.309,87. Ini menunjukkan bahwa pada tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Sidenereng Rappang sebagian besar membiayai kegiatannya dari PAD sendiri. Namun, pada tahun 2021, penurunan kemandirian daerah disebabkan oleh penurunan PAD akibat berkurangnya pendapatan dari retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan faktor lainnya. Walaupun PAD menurun, bantuan dari provinsi meningkat menjadi Rp1.063.529.099.644,00, yang menyebabkan rasio kemandirian turun menjadi 13%. Pada tahun 2022, rasio kemandirian Pemerintah Kabupaten Sidenereng Rappang meningkat menjadi 16%.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenereng Rappang berada pada pola hubungan instruktif (0%-25%, Hasil perhitungan rasio kemandirian ini menunjukkan bahwa keuangan daerah Kabupaten Sidenereng Rappang masih sangat bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat atau provinsi. Daerah tersebut dapat dikategorikan sebagai wilayah yang kurang efektif dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya (Sanga & Jaeng, 2023). Oleh karena itu, untuk mengurangi ketergantungan pada tahun anggaran berikutnya, diperlukan upaya untuk mengoptimalkan potensi PAD. Diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenereng Rappang dapat lebih memaksimalkan penerimaan PAD untuk mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat dan menjadikannya sebagai acuan untuk tahun-tahun mendatang dalam mengoptimalkan PAD daerah.

3. Rasio Efektivitas

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 1 atau 100%. Semakin tinggi rasio efektivitas, semakin baik pula kemampuan daerah dalam melaksanakan tugasnya (Abdul: 234). Kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenereng Rappang dalam menjalankan tugasnya pada tahun 2020-2022 dapat diungkapkan melalui rasio keuangan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 5 Perhitungan Rasio Efektivitas PAD Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2020-2022

Tahun	Target Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp)	%
2020	144.063.516.000,00	132.951.314.765,71	92
2021	159.634.083.500,00	136.809.515.757,39	86
2022	199.960.522.000,00	161.869.158.604,00	81

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Senreng Rappang

Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidenreng Rappang selama periode 2020-2022 menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2020, rasio efektivitas PAD mencapai 92%, tergolong efektif, didukung oleh realisasi yang melebihi target, seperti Pajak Daerah (106,40%), Retribusi Daerah (107,67%), dan Lain-lain PAD yang Sah (86%). Namun, pada tahun 2021, efektivitas menurun menjadi 86%, dengan hanya Pajak Daerah yang melebihi target (106,09%), sementara komponen lainnya seperti Retribusi Daerah (77,07%) dan Lain-lain PAD yang Sah (78,07%) menurun. Penurunan lebih lanjut terjadi pada tahun 2022, dengan rasio efektivitas PAD sebesar 81%, mendekati kategori kurang efektif, dan realisasi Pajak Daerah (75,76%), Retribusi Daerah (68,01%), serta komponen lainnya yang lebih rendah dibanding tahun sebelumnya.

Analisis menunjukkan bahwa fluktuasi efektivitas PAD disebabkan oleh ketidakkonsistenan realisasi beberapa komponen utama, terutama pada tahun 2021 dan 2022. Untuk meningkatkan kinerja PAD, pemerintah daerah disarankan memperkuat sosialisasi pembayaran pajak kepada masyarakat, meningkatkan efisiensi pengelolaan retribusi, serta mendorong kerja sama dengan sektor swasta. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kontribusi PAD terhadap anggaran daerah secara berkelanjutan.

4. Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) mengukur perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan pendapatan yang direalisasikan. Rasio ini menunjukkan kinerja keuangan pemerintah daerah dalam memungut pendapatan dibandingkan dengan pendapatan yang berhasil diperoleh. Kinerja keuangan daerah dikatakan efisien jika rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi ini, semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus menghitung dengan cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterima guna mengetahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya efisien atau tidak. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Anggaran Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 6 Rasio Perhitungan Efisiensi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2020-2022

Tahun	Realisasi Belanja Daerah (Rp)	Anggaran Pendapatan Daerah (Rp)	REKD (%)	Kriteria
-------	----------------------------------	---------------------------------------	-------------	----------

2020	1.057.627.550.145,92	1.225.093.920.000,00	86	Cukup Efisien
2021	1.199.207.773.093,03	1.258.769.098.500,00	95	Kurang Efisien
2022	1.167.869.461.608,00	1.257.309.100.000,00	93	Kurang Efisien

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Senreng Rappang

Berdasarkan perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD), ditemukan bahwa selama periode 2020 hingga 2022, pendapatan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami fluktuasi, dengan peningkatan dari Rp1.225.093.920.000,00 pada tahun 2020 menjadi Rp1.258.769.098.500,00 pada tahun 2021, dan kemudian sedikit menurun menjadi Rp1.257.309.100.000,00 pada tahun 2022. Sementara itu, belanja daerah juga meningkat dari Rp1.057.627.550.145,92 pada tahun 2020 menjadi Rp1.199.207.773.093,03 pada tahun 2021, sebelum turun menjadi Rp1.167.869.461.608,00 pada tahun 2022. Rasio efisiensi menunjukkan bahwa pada tahun 2020, belanja daerah adalah 86% dari pendapatan, yang meningkat menjadi 95% pada tahun 2021, dan menurun menjadi 93% pada tahun 2022. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun efisiensi belanja sedikit meningkat pada tahun 2022, ada kecenderungan untuk pengelolaan keuangan yang kurang optimal pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020. Meskipun terdapat variasi dalam rasio belanja setiap tahunnya, tren keseluruhan menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan efisiensi pengeluaran. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah cermat dalam memperhitungkan biaya yang dikeluarkan (Akhsan, 2023). Ini menandakan perlunya pemerintah daerah untuk terus melakukan evaluasi dan penyesuaian pada belanja dan strategi pendapatan agar pengelolaan keuangan tetap efisien dan berkelanjutan.

5. Rasio Keserasian Belanja

Rasio Belanja Operasi merupakan perbandingan antara total Belanja Operasi dengan Total Belanja Daerah. Rasio ini menunjukkan porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk Belanja Operasi. Belanja Operasi adalah belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga bersifat jangka pendek dan dalam hal tertentu bersifat rutin dan berulang. Biasanya, proporsi Belanja Operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60-90%. Pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan yang tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan yang rendah (Mahmudi, 2010). Rasio Belanja Operasi dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 7 Rasio Belanja Operasi Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2020-2023

Tahun	Belanja Operasi (Rp)	Total Belanja	%
2020	813.595.787.521,47	1.057.627.550.145,92	77
2021	809.151.729.098,27	1.199.207.773.093,03	67
2022	827.062.832.868,00	1.167.869.461.608,00	71

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Senreng Rappang

Rasio Belanja Modal adalah perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Rasio ini memungkinkan pembaca laporan untuk mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal pada tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan panjang, dan meskipun bersifat rutin, umumnya

proporsinya dalam belanja daerah berkisar antara 5-20% (Mahmudi, 2010). Rasio belanja modal ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 8 Rasio Belanja Modal Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2020-2023

Tahun	Belanja Modal (Rp)	Total Belanja	%
2020	233.523.484.982,45	1.057.627.550.145,92	22
2021	260.295.066.840,76	1.199.207.773.093,03	22
2022	224.697.849.840,00	1.167.869.461.608,00	19

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Senreng Rappang

Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan pola pengeluaran yang lebih memprioritaskan belanja operasi dibandingkan belanja modal selama periode 2020-2022. Rasio belanja operasi terhadap realisasi anggaran sebesar 70% pada tahun 2020, 67% pada 2021, dan meningkat menjadi 71% pada 2022, sementara belanja modal hanya 22% pada 2020 dan 2021, kemudian turun menjadi 19% pada 2022. Hal ini mencerminkan fokus pemerintah daerah pada stabilitas operasional dan pelayanan masyarakat, meskipun alokasi untuk pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana masih relatif kecil.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang perlu mempertimbangkan peningkatan alokasi belanja modal untuk mempercepat pembangunan daerah dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Dengan mencapai keseimbangan antara belanja operasi dan belanja modal, pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat infrastruktur, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

6. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan berguna untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran tertentu atau selama beberapa periode anggaran mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja yang positif atau negatif (Mahmudi, 2010). Rasio ini mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan kinerja anggarannya dari satu periode ke periode berikutnya. Dengan mengetahui pertumbuhan setiap komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, pemerintah dapat mengevaluasi potensi-potensi yang perlu mendapatkan perhatian (Abdul Halim, 2007). Rumus untuk menghitung Rasio Pertumbuhan adalah sebagai berikut:

$$r = \frac{P_n - P_o}{P_o}$$

Berikut adalah hasil perhitungan rasio pertumbuhan pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dari tahun 2020 hingga 2022:

1. Pertumbuhan Pendapatan

a. Rasio Pertumbuhan Pendapatan 2020-2021

- $\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{1.200.338.615.401,39 - 1.186.736.488.855,58}{1.186.736.488.855,58}$
- $\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{13.602.126.545,81}{1.186.736.488.855,58} \times 100\%$
- $\text{Rasio Pertumbuhan} = 1\%$

b. Rasio Pertumbuhan Pendapatan 2021-2022

- $Rasio\ Pertumbuhan = \frac{1.172.625.829.994,00 - 1.200.338.615.401,39}{1.200.338.615.401,39}$
 - $Rasio\ Pertumbuhan = \frac{-27.712.785.407,39}{136.809.515.757,39} \times 100\%$
 - $Rasio\ Pertumbuhan = -2\%$
2. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah
- a. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah 2020-2021
- $Rasio\ Pertumbuhan = \frac{136.809.515.757,39 - 132.951.314.765,71}{132.951.314.765,71}$
 - $Rasio\ Pertumbuhan = \frac{3.858.200.991,68}{132.951.314.765,71} \times 100\%$
 - $Rasio\ Pertumbuhan = 3\%$
- b. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah 2021-2022
- $Rasio\ Pertumbuhan = \frac{161.869.158.604,00 - 136.809.515.757,39}{136.809.515.757,39}$
 - $Rasio\ Pertumbuhan = \frac{25.059.642.846,61}{136.809.515.757,39} \times 100\%$
 - $Rasio\ Pertumbuhan = 18\%$
3. Pertumbuhan Belanja Modal
- a. Rasio Pertumbuhan Belanja Modal 2020-2021
- $Rasio\ Pertumbuhan = \frac{260.295.066.840,76 - 233.523.484.982,45}{233.523.484.982,45}$
 - $Rasio\ Pertumbuhan = \frac{26.771.581.858,31}{233.523.484.982,45} \times 100\%$
 - $Rasio\ Pertumbuhan = 11\%$
- b. Rasio Pertumbuhan Belanja Modal 2021-2022
- $Rasio\ Pertumbuhan = \frac{224.697.849.840,00 - 260.295.066.840,76}{260.295.066.840,76}$
 - $Rasio\ Pertumbuhan = \frac{25.059.642.846,61}{260.295.066.840,76} \times 100\%$
 - $Rasio\ Pertumbuhan = -14\%$
4. Pertumbuhan Belanja Operasi
- a. Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi 2020-2021
- $Rasio\ Pertumbuhan = \frac{809.151.729.098,27 - 813.595.787.521,47}{813.595.787.521,47}$
 - $Rasio\ Pertumbuhan = \frac{-4.444.058.423,20}{813.595.787.521,47} \times 100\%$
 - $Rasio\ Pertumbuhan = -1\%$
- b. Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi 2021-2022
- $Rasio\ Pertumbuhan = \frac{827.062.832.868,00 - 809.151.729.098,27}{809.151.729.098,27}$
 - $Rasio\ Pertumbuhan = \frac{17.911.103.769,73}{809.151.729.098,27} \times 100\%$
 - $Rasio\ Pertumbuhan = 2\%$

Tabel 9 Perhitungan Rasio Pertumbuhan APBD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2020-2022

Nama Akun (Keterangan)	Tahun			Rata-Rata
	2020	2021	2022	
Pendapatan	1.186.736.488.855,58	1.200.338.615.401,39	1.172.625.829.994,00	
Pertumbuhan Pendapatan		1%	-2%	-0,6%
PAD	132.951.314.765,71	136.809.515.757,39	161.869.158.604,00	
Pertumbuhan PAD		3%	18%	10,12%
Belanja Modal	233.523.484.982,45	260.295.066.840,76	224.697.849.840,00	

Pertumbuhan B.Modal	11%	-14%	-1,91%
Belanja Operasi	813.595.787.521,47	809.151.729.098,27	827.062.832.868,00
Pertumbuhan B.Operasi	-1%	2%	-0,82%

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Senreng Rappang

Berdasarkan perhitungan Rasio Pertumbuhan Pendapatan, diketahui bahwa pendapatan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dari tahun 2020 hingga 2022 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, pendapatan daerah tercatat sebesar Rp1.186.736.488.855,58, meningkat menjadi Rp1.200.338.615.401,39 pada tahun 2021, namun kemudian sedikit menurun menjadi Rp1.172.625.829.994,00 pada tahun 2022. Berdasarkan perencanaan anggaran pendapatan daerah mulai dari tahun 2020 (1.225.093.920.000,00), 2021 (1.258.769.098.500,00), dan 2022 (1.200.338.615.401,39). Terjadi pertumbuhan dari tahun 2020-2021 (1%), dan pada tahun anggaran 2022 berkurang atau turun (-2%) dari tahun anggaran sebelumnya atau Rp1.257.309.100.000,00. Hal ini disebabkan oleh kebijakan Alokasi Dana Pusat ke Daerah dan fluktuasi dalam komponen-komponen PAD, Berdasarkan perkembangan tahunan yang menunjukkan variasi dalam kenaikan dan penurunan, dapat disimpulkan bahwa Rasio Pertumbuhan Pendapatan Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami pertumbuhan yang tidak stabil.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidenreng Rappang juga menunjukkan fluktuasi dari tahun 2020 hingga 2022. Pada tahun 2020, PAD tercatat sebesar Rp132.951.314.765,71 atau 11% dari total pendapatan. Pada tahun 2021, PAD meningkat dengan menjadi Rp136.809.515.757,39, tetapi kontribusinya sama 11% dari total pendapatan. Namun, pada tahun 2022, PAD mengalami penurunan menjadi Rp161.869.158.604,00 atau 14% dari total pendapatan. Berdasarkan penghitungan Rasio Pertumbuhan PAD, rata-rata pertumbuhan dari tahun 2020 hingga 2022 adalah sekitar 10,12%, dengan pertumbuhan terbesar terjadi dari tahun 2021 ke 2022 sebesar 18%. Ini menunjukkan perubahan positif dalam pengumpulan PAD, meskipun terdapat fluktuasi dalam persentase pertumbuhannya.

Berdasarkan perkembangan Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi menunjukkan variasi antara kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2020, Belanja Operasi Rp813.595.787.521,47, turun sebesar -1% menjadi Rp809.151.729.098,27, namun pada tahun 2022 mengalami pertumbuhan menjadi 2% atau sebesar Rp827.062.832.868,00 dari anggaran sebelumnya. Rata-rata pertumbuhan belanja operasi dari tahun 2020 hingga 2022 adalah -0,82%. Sementara itu, Rasio Pertumbuhan Belanja Modal juga menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2021, belanja modal mengalami pertumbuhan sebesar 11%, namun pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar -14%. Rata-rata pertumbuhan belanja modal dari tahun 2020 hingga 2022 adalah sekitar -1,19%. Proporsi belanja modal masih lebih kecil dibandingkan dengan belanja operasi. Oleh karena itu, pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang disarankan untuk lebih mengalokasikan dana untuk belanja modal agar pembangunan di daerah dapat lebih optimal.

SIMPULAN

Hasil dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kabupaten Sidenreng Rappang belum sepenuhnya mandiri secara finansial, masih bergantung pada bantuan pemerintah pusat untuk mendanai berbagai kegiatan.
2. Efektivitas PAD selama 2020-2022 tidak konsisten. Tahun 2020 efektif, tetapi pada 2021 dan 2022 mengalami penurunan, dengan semua komponen PAD tidak mencapai target pada 2022.
3. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menunjukkan upaya peningkatan efisiensi pengeluaran meskipun terjadi fluktuasi pendapatan dan belanja.
4. Belanja operasi lebih dominan dibanding belanja modal, mencerminkan prioritas pemerintah pada operasional sehari-hari daripada pembangunan.
5. Pendapatan daerah bervariasi, dengan peningkatan pada 2021 dan penurunan pada 2022. Belanja operasi tumbuh kembali pada 2022, sementara belanja modal mengalami penurunan tajam.

Referensi :

- Akhsan, A. T., & Sabri, H. (2023) Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Sebelum Dan Setelah Memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Wtp).
- Amanda, R., Arief, K., & Ishak, J. F. (2021). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Bandung. *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(1), 52-62.
a-sekunder-dan-data-primer/, diakses 09 Januari 2018).
- Aurin, R., Sam, I., & Rahayu, R. (2023). Analisis Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2019-2021. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(4), 1545-1557.
- Awani, M. F., & Hariani, S. (2021). Analisa Rasio Kemandirian Daerah dan Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 3(2), 95-102.
- Dr. Drs. Fadillah Amin, MAP, PhD (2019). *penganggaran dipemerintah daerah dalam perspektif teoritis, Normatif, dan Empiris*. 31(1)
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2018. *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta : Salemba Empat.
- Hesrini, Elly. 2015. Analisis Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bead An Cukai Gresik. *Jurnal ilmu manajemen MAGISTRA*. Vol.1 No.1.
- Hidayah, R., Intikhanah, S., & Habibi, K. A. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Se-Provinsi Jawa Tengah Sebelum Dan Saat Pandemi Covid19: Dibuat Oleh Kurnia Ahsanul Habibi, Sobrotul Intikhanah,
- Ikatan Akuntansi Indonesia 2009. *Standar Akuntansi Keuangan*, Salemba Empat, Jakarta.
- Mahmudi.2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Nuryaman. Christina, V.2015. *Metodologi Penelitian Akuntansi dan Bisnis: Teori dan*
- Nagabiru86's. 2012. *Data Sekunder dan Data Primer*.
(<https://www.google.com.id/amp/s/nagabiru86.wordpress.com/2009/06/12/dat>
- Rahmawati, L., & Warsitasari, W. D. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek Di Masa Pandemi Covid-19 Periode 2020-2021. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis*, 10(1), 339-354.

- Rini Hidayah (Dosen dan Mahasiswa FEB Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan). *Neraca*, 17(1), 122-147.
- Rukayah, Nugrahini Kusunmawati, Raden Irna Afriani. 2017. Analisis Laporan Realisasi Anggaran Dengan Menggunakan Rasio Efektivitas Dean Rasio Efisiensi Pada Kantor Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang. *Jurnal Akuntansi*. Vol.4 No.2
- Sanga, K. P., & Jaeng, W. M. Y. (2023). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur. *Journal On Education*, 5(2), 2721-2728.
- Santie, E.J.G., J.J. Tinangon, L.M. Mawikere. 2015. Analisis Penyajian Realisasi Anggaran Pada Dinas Energy dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*. Vol.3 No.2
- Sarwoko, A. P. (2023). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Untuk Menilai Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Rasio Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019-2021 (Doctoral dissertation, Universitas Pancasakti Tegal).
- Tenda, V.S. Mirki, H. Sabijono., V.Z. Tirayoh. 2014. Analisis Realisasi Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Kota Manado Tahun 2010-2012. *Jurnal EMBA*. Vol.2 No.1
- Tulangow, A.P., T. Runtu. 2016. Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA*. Vol.4 No.3
- Widjajanta, B., Widyaningsih, A., & Tanuatmodjo, H. (2014). *Ekonomi dan Akuntansi: Mengasah Kemampuan Ekonomi*, 20-22. CV Citra Praya
- Wulandari, R., Lestari, B. A. H., & Suryantara, A. B. (2023). Analisis Rasio Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 3(2), 56-69.
- Yuliyah, P. L. R., & Ardini, L. (2022). Analisis Kinerja Pelaksanaan APBD Kota Surabaya Tahun 2016-2020. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 10(2), 118-128.